

TESIS

**PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU
DARI HAK ASASI MANUSIA**



OLEH :

**ROHANI SIANIPAR
NIM 201020252008**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2013**

PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

OLEH :
ROHANI SIANIPAR
NIM 201020252008



Pembimbing I

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Pembimbing II

Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anton Wachidin Widjaja

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 30 Agustus 2013

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/004/VIII/2013/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

2. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN NO. 12967/D/T/K-III2012

PERSETUJUAN TESIS

NAMA : ROHANI SIANIPAR
NIM : 201020252008
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI
HAK ASASI MANUSIA



PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

PROF. KOESPARMONO IRSAN, SIK., SH., MBA., MM

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

MOTTO

Maka kata Pengkhobbah itu :

Dibawah matahari, kemenangan perlombaan bukan

untuk yang cepat.....

keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat.....

juga roti bukan untuk yang berhikmat.....

kekayaan bukan untuk orang yang cerdas.....

dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia.....

karena.....

waktu dan nasib dialami mereka semua.

Ada lagi yang kulihat dibawah matahari.....

di tempat pengadilan, di situpun terdapat ketidakadilan.....

dan di tempat keadilan, disitupun terdapat ketidakadilan.....

dan

aku teringat Dia pernah bersabda.....

Pembalasan itu adalah hak Ku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat pertolongan dan kasih setiaNya, kami dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi syarat tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam tesis ini, Penulis mencoba menganalisis suatu bahasan hukum dengan judul **Penerapan Pidana Mati di Indonesia Ditinjau dari Hak Asasi Manusia.**

Bertitiktolak kepada keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia (KUHP) sejak tahun 1946 yang memuat Pidana Mati sebagai pidana pokok dan perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap hukuman mati serta arah penerapan pidana mati di Indonesia ke depan ditinjau dari hak asasi manusia, maka penulis berharap dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, almamater dan instansi terkait. Penyusunan tesis ini tidak akan berjalan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan pada penulis. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak DRS. MOH. DJATMIKO M.Si., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. ANTON WACHIDIN WIDJAJA SE., MM., selaku Direktur Program Pasca Sarjana, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jaya dan selaku Pembimbing Materi Tesis Pasca Sarjana, yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan bantuan kepada Penulis dari sejak permulaan sampai penulisan Tesis ini selesai.
4. Bapak PROF. KOESPARMONO IRSAN SIK, SH., MBA., MM. selaku Pembimbing Tehnik Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya.

5. Bapak Irjen. Pol. (Purn.) DRS. LOGAN SIAGIAN SH., selaku Staf Pengajar dan Mantan Rektor Universitas Bhayangkara Jaya.
6. Bapak DR. R.M. Panggabean, SH., MH., selaku Staf Pengajar dan salah satu Dosen Penguji yang telah memberikan saran-saran penulisan Tesis.
7. Seluruh Staf Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah memberikan bantuan penyelesaian Tesis ini.
8. Segenap Civitas Academica Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Suami, dan Anak-Anakku yang saya cintai yang terus mendorong dan memberikan semangat dalam menyelesaikan program studi ini. Terutama kepada para Cucuku tersayang, sumber inspirasi dan semangatku yang tak pernah padam untuk terus belajar, semoga ini dapat menjadi pendorong bagi mereka kelak, agar tidak pernah berhenti menuntut ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini banyak mengandung kekurangan, baik substansi maupun penulisannya. Hal ini penulis sadari disebabkan keterbatasan kemampuan penulis sendiri, maka untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan kami terima dengan baik dan senang hati.

Jakarta, 15 Agustus 2013.

Penulis

Rohani Sianipar

ABSTRAK

Judul Tesis : Penerapan Pidana Mati di Indonesia Ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

Tujuan tesis ini adalah menganalisis kemungkinan penghapusan pidana mati yang selama ini telah lama diperdebatkan di Indonesia oleh pihak yang setuju dan pihak yang tidak setuju. Di satu sisi, pihak yang tetap mempertahankan hukuman mati memberikan argumen bahwa pidana mati itu masih diperlukan bagi kejahatan-kejahatan di luar batas perikemanusiaan, kejahatan narkoba, terorisme dan sejenisnya. Hukuman mati diperlukan sebagai penjeraan bagi pihak lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Di sisi yang lain, pihak yang tidak setuju terhadap hukuman mati memberikan argumen bahwa pasal-pasal dalam KUHP termasuk pidana mati sangat kental bernuansa penghukuman atau pembalasan (*punishment*) daripada memperbaiki atau pemulihan (*treatment*). Pada hal paradigma hukum di dunia internasional saat ini lebih mengedepankan pemulihan. Masalah ini diangkat karena banyak negara telah menghapuskan pidana mati (119 negara) termasuk Belanda sejak tahun 1870 yang justru memberlakukannya di Indonesia sejak tahun 1918. Pidana mati yang berlaku di Indonesia, dan masih terus diperdebatkan, sampai sekarang tidak memperlihatkan semakin berkurangnya kejahatan luar biasa yang dijatuhi pidana mati. Di samping itu dunia peradilan Indonesia juga tidak luput dari kesalahan seperti pada kasus Sengkon dan Karta serta kasus hukuman mati Ruben dan anaknya yang dipersoalkan baru-baru ini. Selain daripada itu kejahatan narkoba semakin hari semakin berkembang, walaupun pembuat dan pengedarnya sudah ada yang dihukum mati dan saat ini banyak yang sedang menunggu pelaksanaan eksekusinya. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural seluruh undang-undang dan peraturan hukum di Indonesia yang dalam pembukaannya memuat Pancasila, juga merupakan argumen penting agar hukuman mati dihapuskan. Hukuman mati tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Untuk menjawab perbedaan pendapat tersebut, penulis mempergunakan jenis penelitian hukum normatif. Kajian yang dilakukan hanya berupa penelurusan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, Undang-Undang, tulisan-tulisan ilmiah, artikel di surat kabar dan majalah maupun bahan-bahan "*on line*" di internet dan sebagainya. Dengan mempergunakan metode tersebut diharapkan terkumpul data sekunder yang cukup. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai bahan analisis sehingga pembahasan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil yang valid.

NAMA : ROHANI SIANIPAR

NIM : 201020252008

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

ABSTRACT

The purpose of the thesis "*The application of the death penalty in Indonesia in terms of human rights*" is to present the analysis of the death penalty and human rights or abolition of the death penalty that had been long debated by those who agree and those who oppose it. On the one hand, parties want to maintain the death penalty giving the argument that the death penalty is still required for crimes beyond the humanitarian, drug crimes, terrorism and the like. The death penalty is still needed as a punishment scary for others for not doing the same crimes. On the other hand, opposed to the death penalty provide the strong position that the content of the KUHP (the book of penal law) such as the dead penalty reflected the punishment more as a retaliation rather than treatment or aim to recover. Whereas the paradigm of criminal law nowadays internationally over seeks treatment and recovery.

The problem was emerged because many countries (so far 119) have abolished the dead penalty including the Netherlands in 1870 which thus apply in Indonesia since 1918. The dead penalty that has been applied in Indonesia until now does not lead to reduce exceptional crimes significantly. The death sentence is still debatable. In addition the experiences of judicial court in Indonesia also are not immune from mistakes such as in the case of Sengkon and Karta in 1974 and the dead penalty case of Ruben and son that bring into the attention of the public in 2013. Other than that, narcotics crimes are increasingly growing even though many producers and circulators widely that had been executed besides many are still in the waiting list of execution.

The existence of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia as the structural basis of all laws and regulations in Indonesia, which in the prologue contains the Pancasila, is also an important argument for the dead penalty need to be abolished. The dead penalty is incompatible with the humanitarian as the second principle of the Pancasila and also contrary to human rights, namely the right to life.

To provide answer to these problems, as the author, I use the type of normative research. The study was conducted with a search materials from libraries namely books, laws, scientific writings, related articles from magazines and newspapers and on-line sources from internet. By using the such method of research, I expect many of the secondary data collected could be enough so that the study can provide the valid result.

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup Penelitian	10
E. Kerangka Teori, Konsepsional dan Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Pidana	29
B. Pertanggung jawaban Pidana	32
C. Pidana dan Teori Pidana	35
D. Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia	42

BAB III. Pengaruh Ancaman Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan

A.	Sejarah Pidana Mati	51
B.	Sejarah Pidana Mati di Indonesia	66
C.	Sistem Pemidanaan di Indonesia dilihat dari HAM	89
D.	Kejahatan yang Diancam Pidana Mati	94
E.	Ancaman Pidana Mati dan Pengaruhnya terhadap Pelaku Kejahatan .	98

BAB IV. Pidana Mati dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

A.	Pidana Mati	103
B.	Hak Asasi Manusia	110
C.	Penerapan Pemidanaan	136
D.	Kontroversi Penerapan Pidana Mati di Indonesia	140
E.	Arah Kebijakan Penerapan Pidana Mati ke Depan.....	159

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

A.	Kesimpulan	167
B.	Saran	172

Daftar Pustaka

Surat Pernyataan

Riwayat Hidup